# PENGARUH PENERAPAN PEMERIKSAAN INTERNAL TERHADAP EFEKTIVITAS STRUKTUR PENGENDALIAN INTERN DAN DAMPAKNYA TERHADAP KINERJA KEUANGAN (Studi pada PDAM di Propinsi Jawa Barat)

## Riani Tanjung

Fakultas Ekonomi Universitas Jendral Achmad Yani e-mail : rianitanjung85@yahoo.com

#### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis (1) pengaruh langsung penerapan pemeriksaan internal terhadap efektivitas struktur pengendalian intern pada PDAM di Provinsi Jawa Barat (2) pengaruh langsung efektivitas struktur pengendalian intern terhadap kinerja keuangan pada PDAM di Provinsi Jawa Barat (3) pengaruh langsung penerapan pemeriksaan internal terhadap kinerja keuangan pada PDAM di Provinsi Jawa Barat (4) pengaruh tidak langsung penerapan pemeriksaan internal terhadap kinerja keuangan melalui efektivitas struktur pengendalian intern pada PDAM di Provinsi Jawa Barat.

Metode penelitian yang digunakan ialah deskriptif verifikatif pada 22 orang yang meliputi Direktur Umum, Kepala bagian SPI dan Kepala bagian keuangan dengan menggunakan analisis jalur.

Hasil penelitian menunjukan bahwa secara umum penerapan pemeriksaan internal berada dalam kategori baik. Hal ini dapat dilihat dari segi indepedensi, keahlian profesional, lingkup kegiatan, pelaksanaan kegiatan pemeriksaan, pengelolaan bagian pemeriksaan internal, pengalaman kerja, frekuensi pemeriksaan, Jumlah staf auditor internal dan teknologi semuanya berada dalam kategori baik. Ditinjau dari efektivitas struktur pengendalian intern secara umum termasuk dalam kategori baik. Hal tersebut dapat dilihat dari segi lingkungan pengendalian, penaksiran resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan. Kemudian, ditinjau dari kinerja keuangan PDAM di Provinsi Jawa Barat maka secara umum berada dalam kategori cukup baik. Selanjutnya, penerapan pemeriksaan internal memiliki pengaruh terhadap efektivitas struktur pengendalian intern pada PDAM di Provinsi Jawa Barat, efektivitas struktur pengendalian intern memiliki pengaruh langsung terhadap kinerja keuangan pada PDAM di Provinsi Jawa Barat, penerapan pemeriksaan internal memiliki pengaruh langsung terhadap kinerja keuangan pada PDAM di Provinsi Jawa Barat dan penerapan pemeriksaan internal memiliki pengaruh tidak langsung terhadap kinerja keuangan melalui efektivitas struktur pengendalian intern pada PDAM di Provinsi Jawa Barat.

Kata Kunci : Pemeriksaan Internal, Efektivitas Struktur Pengendalian, Kinerja Keuangan

### **ABSTRACT**

This study aims to determine and analyze (1) the direct influence of the application of an internal examination of the effectiveness of internal control structure at the taps in the province of West Java (2) a direct influence on the effectiveness of internal control structure of the financial performance of the taps in the province of West Java (3) the direct effect of the application internal examination of the financial performance of the taps in the province of West Java (4) the indirect effect of the application of an internal examination of the financial performance through the effectiveness of internal control structure at the taps in West Java Province.

The research method used is descriptive verifikatif on 22 people including the Director General, Head of the SPI and the Head of the financial section by using path analysis.

The results showed that in general the implementation of internal audit is in either category. It can be viewed in terms of indepedensi, professional expertise, scope of activities, the implementation of inspection activities, the management of the internal examination, work experience, the frequency of examination, number of staff of internal auditors and technology are all in either category. Judging from the effectiveness of internal control structure is generally included in either category. This can be viewed in terms of the control environment, risk assessment, control activities, information and communication and monitoring. Then, in terms of financial performance taps on the West Java Province in general are in a category quite well. Furthermore, the implementation of internal audit has an influence on the effectiveness of internal control structure at the taps in the province of West Java, the effectiveness of internal control structure has a direct impact on the financial performance of taps in the province of West Java, the implementation of internal audit has a direct impact on the financial performance of taps in Provincial Java West and the application of internal audit have an indirect impact on financial performance through the effectiveness of internal control structure at the taps in West Java Province.

Keywords: Internal Examination, Effectiveness of Control Structure, Financial Performance

### A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang dan memiliki jumlah penduduk lebih dari 200 juta juga menghadapi permasalahan dalam rangka pemenuhan air bersih. Permasalahan penyediaan air bersih tersebut dipicu oleh beberapa hal. Pertama,sikap masyarakat terhadap air, dimana di Indonesia air dieksploitasi secara berlebih. Air dimanfaatkan seolah-olah berlimpah dan merupakan barang bebas. Padahal dengan semakin terbatasnya jumlah air, maka hukum ekonomi berlaku dimana air merupakan

benda ekonomis. Kedua, kondisi wilayah geografis. Indonesia mempunyai daerah yang dikategorikan wilayah pegunungan. Selain itu banyak wilayah yang memiliki garis pantai, dimana air sumur tidak bisa direkomendasikan lagi untuk keperluan rumah tangga, terutama untuk aktivitas memasak karena adanya abrasi pantai laut dan bentuk pencemaran lainnya (JJ. Amstrong Sembiring:2004). Ketiga, pertumbuhan penduduk yang cukup pesat serta perkembangan wilayah dan industri yang cukup pesat. Masyarakat dan industri perkotaan inilah yang termasuk boros air (Jurnal Pengelolaan Air Bersih disaat Krisis, Agustus 2007).

Di Indonesia, pengelolaan penyediaan air minum dilakukan oleh PDAM sebagai penyelenggara utama pelayanan air minum. Hal ini merupakan konsekuensi dari fungsi air di Indonesia. Air dipandang sebagai, *Pertama*, Air merupakan bagian dari hak-hak asasi manusia yang mengandung suatu nilai universal, dimana kebutuhan tersebut tidak boleh dilimitasi, dieleminir sebagian dan atau seluruhnya, dan kebutuhan tersebut juga sudah menjadi hak konstitusional setiap warga Negara. *Kedua*, air merupakan cabangcabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dan harus menjadi tanggung-jawab pemerintah. (JJ. Amstrong, 2004). Oleh karena air dipandang sebagai cabang produksi yang menguasai hidup orang banyak, maka air "harus dikuasai negara", termasuk Perusahaan Daerah Air Minum selanjutnya disebut PDAM dalam artian, sebagaimana juga yang telah diamanatkan di dalam pasal 33 ayat (2) UUD 1945 yang bukan saja berlaku untuk Republik Indonesia, tetapi juga berlaku di banyak negara, termasuk negara-negara yang sudah maju, seperti halnya di Amerika dan Eropa (JJ. Amstrong Sembiring,2004).

Kehadiran PDAM di Indonesia sebagai penyelenggara utama pelayanan air minum dimungkinkan melalui Undang-Undang No. 5 tahun 1962 sebagai kesatuan usaha milik Pemerintah Daerah yang memberikan jasa pelayanan dan menyelenggarakan kemanfaatan umum di bidang air minum. Aktifitas PDAM mulai dari mengumpulkan, mengolah dan menjernihkan, sampai ke mendistribusikan ke pelanggan (Jurnal Pengelolaan Air Bersih disaat Krisis, Agustus 2007). Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 269/KPTS/1984 tanggal 8 Agustus 1984, dikatakan bahwa pelaksanaan penggelolaan sarana dan prasarana penyediaan air bersih tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan air bersih kepada masyarakat secara adil dan merata, terus menerus sesuai dengan persyaratan higienis serta bertujuan menghasilkan pertambahan penghasilan bagi pemerintah daerah. Selanjutnya Surat Keputusan Menteri dalam negeri Nomor: 690-069 tahun 1994 diatur tentang pola petunjuk teknis PDAM antara lain sebagai berikut:

- a. Mempunyai fungsi pokok Pelayanan Umum kepada Masyarakat;
- b. Harus mampu membiayai dirinya sendiri;
- c. Harus mengembangkan tingkat pelayanannya;
- d. Mampu memberikan sumbangan pembangunan daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah.

Tujuan tersebut diatas dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi PDAM dalam menjalankan organisasinya. Akan tetapi dalam kenyataanya PDAM mengalami beberapa kendala/permasalahan sehingga dapat dikatakan tidak berhasil dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Kinerja PDAM pada umumnya belum memenuhi standar dan kebanyakan berada dalam kondisi "sakit". Beberapa faktor penyebab sakitnya PDAM diantaranya: *Pertama*, biaya operasional melonjak tinggi

melampaui kemampuan pendapatan PDAM. Hal ini terutama disebabkan naiknya harga bahan-bahan kimia serta peralatan pemeliharaan pasca krisis ekonomi 1997; Kedua, harga jual rata-rata air masih rendah, yakni Rp. 1.400 per meter kubik (m3) sedangkan biaya operasi mencapai Rp. 1.485 per meter kubik. Akibatnya, banyak PDAM tidak mampu bayar utang yang kini mencapai Rp. 4,033 Trilyun ; Ketiga, PDAM juga tidak mendapatkan dana investasi memadai untuk memperluas jangkauan pelayanan, di samping terus melemahnya daya beli masyarakat yang tempat tinggalnya belum terjangkau jaringan distribusi PDAM (PDAM di tengah gempuran Privatisasi, www.ampl.or.id, 2007).

Selain permasalahan tersebut diatas, salah satu yang menjadi sorotan terhadap PDAM adalah banyaknya PDAM yang mempunyai beban utang yaitu sebanyak 90% dari total PDAM yang ada di seluruh Indonesia. Hal ini diketahui dari pernyataan Pemerintah yang akan segera privatisasi sekitar 80 hingga 90 persen dari sekitar 300-an PDAM di Indonesia yang masuk kategori sakit (Tempo interaktif 27 April 2007). Hal ini seharusnya tidak terjadi karena kebanyakan PDAM membiayai pengembangan dari dana hibah pemerintah dan pinjaman konsesi, dan sangat sedikit sekali yang sanggup mendanai dengan dana sendiri (Kerangka kebijakan sektor air minum, www.google.com).

Fenomena diatas, menggambarkan bahwa PDAM mengalami banyak permasalahan dan mempunyai kinerja keuangan yang kurang. Kondisi yang sama juga terjadi pada PDAM Propinsi Jawa Barat, pada lima tahun kurun terakhir, seputar (a) Tingkat kehilangan air masih relatif tinggi, (b) Cakupan pelayanan masih relatif rendah , karena keterbatasan produksi dan untuk menjangkau distribusi penyebaran penduduk masih diperlukan investasi yang cukup besar, dan (c) Biaya listrik telah menempatkan biaya yang paling besar dalam struktur biaya.

Menurut data yang diperoleh, sejak PDAM diserahkan pengelolaannya kepada Pemerintah, PDAM terus mengalami kerugian. Ironis memang, sebagai perusahaan monopoli logikanya PDAM tidak sampai merugi. Memang diakui ada misi sosial di balik misi tersebut, namun harus ada perhitungan yang jelas agar tidak merugi sementara pelayanan masih perlu ditingkatkan di sana-sini. Untuk mengatasi masalah ini maka perlu ada penanganan yang serius dari pihak Pemerintah masing-masing propinsi.

Pemeriksaan internal mempunyai ciri dan fungsi paling dasar yaitu melaksanakan kegiatan menyangkut pembahasan masalah intern organisasi, dengan memberikan kepastian kepada dewan direksi dan manajemen, mengenai hasil evaluasi dan pengujian suatu aktivitas organisasi yang disesuaikan dengan kriteria yang tepat dan memberikan rekomendasi mengenai serangkaian tindakan kepada pihak manajemen.

Ruang lingkup pemeriksaan internal tidak hanya menyangkut kebenaran dan kewajaran perhitungan matematis, namun mencakup seluruh aspek organisasi perusahaan. Fungsi pemeriksaan internal sendiri adalah melaksanakan kegiatan bebas dan memberikan saran-saran kepada manajemen, yang berguna untuk mengukur dan meneliti semua aktivitas perusahaan, diantaranya penerapan struktur pengendalian intern. Dalam proses pelaksanaannya, staf auditor internal membutuhkan Norma Pemeriksaan Internal yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugasnya, yang terdiri dari : Independensi, keahlian profesional, lingkup kegiatan, pelaksanaan kegiatan pemeriksaan, dan pengelolaan bagian pemeriksaan internal.

Dalam penelitian ini selain dari lima standar umum praktik pemeriksaan di atas, ditambah juga dengan pengalaman kerja, frekuensi pemeriksaan, jumlah staf auditor internal dan teknologi yang digunakan, ini mengacu pada penelitian sebelumnya. Penelitian dari Frederic & Libby (1995) menunjukkan adanya pengaruh pengalaman yang signifikan terhadap pembuatan keputusan yang lebih kompleks, seperti mencari kelemahan sistem pengendalian intern dan mencari kesalahan pencatatan.

Selain pengalaman kerja, frekuensi pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor eksternal akan menentukan keandalan pemeriksaan internal, karena semakin berkualitasnya pemeriksaan internal semakin bersemangat dan termotivasi dalam menjalankan tugasnya, dan mempertahankan pendapat wajar tanpa pengecualian dari auditor eksternal (Nugroho Widjayanto, 2002:8).

Jumlah staf auditor internal juga menentukan kualitas pemeriksaan internal. Pembagian tugas pemeriksaan akan semakin sempurna apabila jumlah staf pemeriksa internnya semakin banyak (Hamilton, 2000:14). Semakin canggih teknologi pemeriksaan yang dipakai maka akan semakin akurat dan tepat waktu informasi yang diperoleh dan dihasilkan (PPA-STAN, 2004:23).

Lima standar umum praktik pemeriksaan dan ditambah dengan pengalaman kerja, , frekuensi pemeriksaan, jumlah staf auditor internal dan teknologi yang digunakan merupakan faktor-faktor pembentuk dari pemeriksaan internal. Semakin dipatuhinya faktor-faktor tersebut maka akan semakin berkualitas pemeriksaan internal tersebut. Apabila dihubungkan dengan lima komponen struktur pengendalian intern menurut Arens Elder dan Beasley (2008:274), yaitu:(a) Control environment; (b) Risk assessment; (c) Control activities; (d) Information and communication dan (e) Monitoring, maka harapan penerapan struktur pengendalian intern yang efektif pun akan tercapai, yang berarti efektivitas dari struktur pengendalian intern dapat diwujudkan dan kinerja keuangannya pun diharapkan akan menunjukan hasil yang baik. Hal ini bisa dibuktikan dengan satu contoh kasus dimana jika perusahaan telah menerapkan salah satu komponen lingkungan pengendalian yaitu komitmen terhadap kompetensi dimana perusahaan telah tepat mendayagunakan dan memposisikan karyawan sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya misalkan menempatkan karyawan yang memiliki kompetensi dalam menyusun laporan keuangan maka akan berdampak terhadap keandalan laporan keuangan perusahaan yang disusunnya karena laporan keuangan telah disusun oleh orang yang tepat dan berkompeten.

Berdasarkan uraian di atas, maka perusahaan membutuhkan keberadaan fungsi pemeriksaan internal. Dalam pelaksanaan pemeriksaan ini, PDAM sendiri telah mempunyai suatu pedoman pemeriksaan internal (Satuan Pengawasan Intern/SPI), dan sesuai PP No.3 tahun 1983 tentang tata cara pembinaan dan pengawasan perusahaan jawatan (Perjan), Perusahaan umum (Perum), dan Perusahaan perseroan (Persero), dimana fungsi SPI ini sama dengan pemeriksaan internal. Oleh karena itu peneliti mencoba menganalisis penerapan pemeriksaan internal (audit internal) yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan melalui efektivitas struktur pengendalian intern sebagai variabel intervening.

Barat)

## Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian tersebut, maka pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

- 1. Bagaimana pengaruh langsung penerapan pemeriksaan internal terhadap efektivitas struktur pengendalian intern pada PDAM di Pronvinsi Jawa Barat?
- 2. Baiamana pengaruh langsung efektivitas struktur pengendalian intern terhadap kinerja keuangan pada PDAM di Pronvinsi Jawa Barat?
- 3. Baiamana pengaruh langsung penerapan pemeriksaan internal terhadap kinerja keuangan pada PDAM di Pronvinsi Jawa Barat?
- 4. Baiamana pengaruh tidak langsung penerapan pemeriksaan internal terhadap kinerja keuangan melalui efektivitas struktur pengendalian intern pada PDAM di Pronvinsi Jawa Barat?

## **Tujuan Penelitian**

- 1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh langsung penerapan pemeriksaan internal terhadap efektivitas struktur pengendalian intern pada PDAM di Pronvinsi Jawa Barat.
- 2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh langsung efektivitas struktur pengendalian intern terhadap kinerja keuangan pada PDAM di Pronvinsi Jawa Barat.
- 3. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh langsung penerapan pemeriksaan internal terhadap kinerja keuangan pada PDAM di Pronvinsi Jawa Barat.
- 4. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh tidak langsung penerapan pemeriksaan internal terhadap kinerja keuangan melalui efektivitas struktur pengendalian intern pada PDAM di Pronvinsi Jawa Barat.

### Kegunaan Hasil Penelitian

### a. Kegunaan Pengembangan Ilmu

- 1. Memberikan bukti empiris mengenai pengaruh penerapan pemeriksaan internal terhadap efektivitas struktur pengendalian intern dan kinerja keuangan.
- 2. Sebagai bahan kajian lebih lanjut bagi penelitian dan pengembangan ilmu akuntansi khususnya bidang auditing (pemeriksaan internal), organisasi profesi audit internal, dan pihak-pihak lain yang berkompeten dalam bidang audit pada perusahaan sejenis, dalam kaitannya dengan penerapan pemeriksaan internal terhadap efektivitas struktur pengendalian intern dan kinerja keuangan.

### b. Kegunaan Operasional

1. Sebagai sumbangan informasi untuk auditor internal dan dewan direksi dalam hal penerapan pemeriksaan internal di perusahaan sejenis yang mempunyai departemen atau bagian pemeriksa internal, dan memberikan informasi yang dapat dijadikan sebagai alternatif pertimbangan agar dapat memahami bahwa pentingnya penerapan pemeriksaan internal

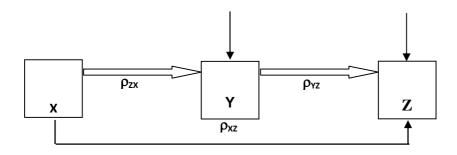
- dilaksanakan terhadap efektivitas struktur pengendalian intern dan kinerja keuangan.
- 2. Bagi penulis, dengan adanya penelitian ini akan menambah pengetahuan mengenai pentingnya penerapan pemeriksaan internal terhadap efektivitas struktur pengendalian intern dan kinerja keuangan.
- 3. Sebagai tambahan perbendaharaan referensi kepustakaan pada Fakultas Ekonomi Universitas Jendral Achmad Yani untuk dipergunakan sebagai acuan alternatif bagi peneliti selanjutnya, di bidang dan perusahaan yang sama.

#### **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif verifikatif, dimana tujuannya untuk menyajikan gambaran secara terstruktur, faktual dan akurat, selanjutnya untuk meneliti hubungan antar variabel akan dianalisis statistik untuk diambil suatu kesimpulan.

Mengingat penelitian ini deskriptif verifikatif yang akan dilakukan pengumpulan data di lapangan, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode sensus, yakni penelitian mengambil semua populasi yang ada dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data untuk variabel X dan variabel Y dan menggunakan pengolahan data sekunder untuk variabel Z. penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsi dan pengujian hipotesis (hypothesis testing). Hipotesis dalam penelitian ini yaitu Pengaruh Penerapan Pemeriksaan Internal (X) terhadap Efektivitas Struktur Pengendalian Intern (Y) atau Hipotesis-1, Pengaruh Langsung Efektivitas Struktur Pengendalian Intern (Y) terhadap Kinerja Keuangan (Z) atau Hipotesis-2, Pengaruh Langsung Penerapan Pemeriksaan Internal (X) terhadap Kinerja keuangan (Z) atau Hipotesis-3, Pengaruh Tidak Langsung Penerapan Pemeriksaan Internal (X) terhadap Kinerja Keuangan (Z) melalui Efektivitas Struktur Pengendalian Intern (Y) atau Hipotesis-4.

Populasi target dalam penelitian ini pada 22 PDAM yang ada di Propinsi Jabar. Responden dalam penelitian ini adalah Kepala bagian SPI dan Kepala bagian keuangan. Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer dan data sekunder. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan ialah analisis jalur. Oleh karena itu, hubungan antar variabel yang digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1.1 **Model Pengaruh Variabel Penelitian** 

# Keterangan:

X = Penerapan Pemeriksaan Internal

Y = Efektivitas Struktur Pengendalian Intern

Z = Kinerja Keuangan

 $\begin{aligned}
 \rho_{YX} &= Besarnya \ pengaruh \ X \ terhadap \ Y \\
 \rho_{YZ} &= Besarnya \ pengaruh \ Y \ terhadap \ Z \\
 \rho_{ZX} &= Besarnya \ pengaruh \ X \ terhadap \ Z
 \end{aligned}$ 

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

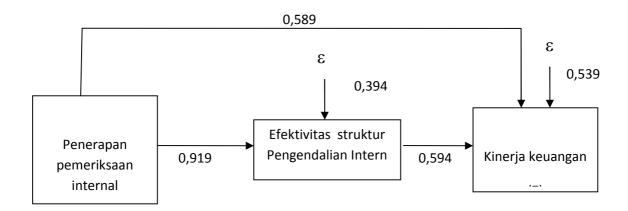
Berdasarkan hasil pengolahan data primer untuk variabel penerapan pemeriksaan internal, semua dimensi yang meliputi indepedensi, keahlian profesional, lingkup kegiatan, pelaksanaan kegiatan pemeriksaan, pengelolaan bagian pemeriksaan internal, pengalaman kerja, frekuensi pemeriksaan, jumlah staf auditor internal, teknologi pada variabel penerapan pemeriksaan internal memiliki kategori tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa penerapan pemeriksaan internal pada PDAM di Jawa Barat sudah dapat dikatakan baik. Sedangkan untuk variabel efektivitas pengendalian internal semua dimensi yang meliputi lingkungan pengendalian, penaksiran resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi serta pematauan pada variabel efektivitas keandalan struktur pengendalian internal memiliki kategori baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa efektivitas struktur pengendalian internal memiliki kategori baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa efektivitas struktur pengendalian internal pada PDAM di Jawa Barat sudah dapat dikatakan baik.

Berdasarkan hasil pengolahan data sekunder seluruh klasifikasi kinerja keuangan PDAM Jawa barat cukup baik. Ada beberapa daerah yang klasifikasi kinerja keuangannya baik. Adanya peningkatan rasio laba, turut membantu meningkatkan kinerja keuangan.

Kinerja keuangan di beberapa kabupaten di provinsi Jawa Barat pada umumnya cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat kinerja keuangan di masing-masing kabupaten seperti kabupaten Banjar, kabupaten Sumedang, kabupaten Cianjur, kabupaten Bogor, kabupaten Cirebon, kabupaten Purwakarta, kabupaten Indramayu, kabupaten Sukabumi, kabupaten Majalengka, kabupaten Subang, kabupaten Karawang, kota Cirebon, kota Bandung, kabupaten Bandung, kabupaten Bekasi dan kota Bekasi. Kinerja keuangan merupakan salah satu indikator keberhasilan perusahaan dalam menjalankan kegiatannya. Salah satu keberhasilan kinerja perusahaan adalah menggunakan tolak ukur keuangan, dengan melihat kontribusi penerapan suatu pengambilan keputusan, maka dapat menggunakan analisis rasio terhadap laba perusahaan.

Sedangkan kinerja keuangan di kabupaten atau kota lainnya yaitu kota Bogor, kabupaten Garut, kabupaten Tasikmalaya, kabupaten Ciamis, kota Sukabumi, kabupaten Kuningan pada umumnya baik. Lima kabupaten tersebut merupakan daerah potensial untuk peningkatan kinerja keuangan. Hal ini dikarenakan di kabupaten atau kota tersebut dapat mengelola keuangan dengan baik sehingga di lima daerah tersebut memiliki kinerja keuangan yang baik.

Kemudian hasil penelitian selanjutnya mengenai pengaruh langsung dan tidak langsung dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2.2 Koefesien Pengaruh penerapan pemeriksaan internal terhadap efektivitas pengendalian intern dan dampaknya terhadap kinerja keuangan

Berdasarkan gambar diatas maka dapat diketahui bahwa penerapan pemeriksaan internal memiliki pengaruh terhadap efektivitas struktur pengendalian intern sebesar 0,919. Artinya sebesar 0,919 efektivitas struktur pengendalian intern dipengaruhi oleh penerapan pemeriksaan internal Untuk pengaruh variabel lain yang tidak diteliti ialah sebesar 0,394. Kemudian efektivitas struktur pengendalian internal memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan sebesar 0,594. Artinya sebesar 0,594 variabel efektivitas struktur pengendalian intern dipengaruhi oleh kinerja keuangan. Dan pengaruh variabel lain yang tidak diteliti ialah sebesar 0,539. Selanjutnya, penerapan pemeriksaan internal memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan sebesar 0,589. Artinya sebesar 0,589 kinerja keuangan dipengaruhi oleh penerapan pemeriksaan internal.

Jadi dapat disimpulkan bahwa penerapan pemeriksaan internal memiliki pengaruh terhadap efektivitas pengendalian intern sebesar 0,845. Hal tersebut memberikan maksud bahwa sebesar 0,845 efektivitas pengendalian intern dipengaruhi oleh penerapan pemeriksaan internal. Efektivitas struktur pengendalian intern memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan sebesar 0,353. Hal tersebut memberikan arti bahwa sebesar 0,353 kinerja keuangan dipengaruhi oleh efektivitas struktur pengendalian intern. Penerapan pemeriksaan internal memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan sebesar 0,347. Hal tersebut memberikan arti bahwa sebesar 0,347 penerapan pemeriksaan internal memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan. Sedangkan penerapan pemeriksaan internal (X) berpengaruh secara tidak langsung terhadap kinerja keuangan melalui efektivitas struktur pengendalian intern sebesar 0,321. Artinya bahwa kinerja keuangan dipengaruhi oleh penerapan pemeriksan internal melalui efektivitas struktur pengendalian intern sebesar 0,321.

Untuk mengukur seberapa jauh kemampuan variabel bebas dalam menerangkan variabel yang terikat digunakan uji koefisien determinasi dari harga R<sup>2</sup>. Perhitungan regresi hasil olah data SPSS. 17 ditunjukkan pada tabel 4.96. berikut ini:

Tabel 1.3 Koefisien Determinasi

Rochsten Determinasi				
			Adjusted	Std. Error of the
Model	R	R Square	R Square	Estimate
1	.675(a)	.686	.699	1.737

a Predictors: (Constant), Y, X

Dari tampilan output SPSS model *summary*, besarnya R<sup>2</sup> adalah 0,686. Hal ini berarti 68,6% kinerja keuangan dapat dijelaskan atau dipengaruhi oleh penerapan pemeriksaan internal dan efektivitas struktur pengendalian internal sedangkan sisanya 31,4% (100%-68,6%) dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain di luar model. Dengan kata lain penerapan pemeriksaan internal dan efektivitas struktur pengendalian internal memberikan kontribusi sebesar 68,6% terhadap kinerja keuangan.

## D. KESIMPULAN DAN SARAN

## 1. Kesimpulan

- a) Penerapan pemeriksaan internal memiliki pengaruh terhadap efektivitas struktur pengendalian intern pada PDAM di Provinsi Jawa Barat. Artinya semakin baik penerapan pemeriksaan internal yang dilakukan pada PDAM di Provinsi Jawa Barat maka semakin baik pula efektivitas struktur pengendalian intern.
- b) Efektivitas struktur pengendalian intern memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pada PDAM di Provinsi Jawa Barat. Artinya semakin baik efektivitas struktur pengendalian intern maka akan meningkatkan kinerja keuangan pada PDAM di Provinsi Jawa Barat.
- c) Penerapan pemeriksaan internal memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pada PDAM di Provinsi Jawa Barat. Artinya semakin baik penerapan pemeriksaan internal yang dilakukan pada PDAM di Provinsi Jawa Barat maka akan meningkatkan kinerja keuangan.
- d) Penerapan pemeriksaan internal memililiki pengaruh tidak langsung terhadap kinerja keuangan melalui efektivitas struktur pengendalian intern pada PDAM di Pronvinsi Jawa Barat. Artinya semakin baik penerapan pemeriksaan internal maka akan meningkatkan kinerja keuangan di PDAM di Provinsi Jawa Barat yang melalui efektivitas struktur pengendalian intern.

#### 2. Saran

- a) Bahwa penerapan pemeriksaan internal sangat mempengaruhi efektivitas struktur pengendalian intern dan berdampak pula terhadap kinerja keuangan seluruh PDAM di provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu disarankan:
  - 1. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai auditor internal, harus benar-benar memperhatikan faktor-faktor pembentuk tersebut (faktor-faktor dari penerapan pemeriksaan internal).
  - 2. Agar para Direktur Utama PDAM memiliki komitmen yang kuat berkaitan dengan saran-saran yang diberikan auditor internal, artinya rekomendasi

- tersebut dijadikan acuan untuk perbaikan/peningkatan struktur pengendalian intern PDAM.
- 3. Agar para Direktur Umum bersikap untuk mendukung peningkatan kompetensi auditor internal secara signifikan, dapat dilakukan melalui program sertifikasi profesi, baik sertifikasi tingkat nasional maupun internasional, dapat juga dengan mengirimkan para staf bagian pemeriksaan internal untuk mendalami bidang tertentu.
- b) Bagi peneliti (akademisi, praktisi) dan pihak-pihak lain yang tertarik melakukan penelitian dengan topik yang terkait dengan penelitian ini, disarankan untuk dapat menggali faktor-faktor lain dari penerapan pemeriksaan internal dan efektivitas struktur pengendalian intern yang mempengaruhi kinerja keuangan. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian dimana masih terdapat 31.4% variabel lainnya yang mempengaruhi kinerja keuangan yang belum digali dalam penelitian ini.
- c) Agar bisa diperoleh pengaruh penerapan pemeriksaan internal terhadap efektivitas struktur pengendalian intern dan dampaknya terhadap kinerja keuangan PDAM secara keseluruhan, maka hal ini memberi peluang bagi peneliti selanjutnya untuk meneliti seluruh PDAM yang ada di Indonesia, tidak terbatas hanya pada PDAM di provinsi Jawa Barat.

### E. DAFTAR PUSTAKA

- Arrens, Alvin and James K. Loebecke. 2008. *Auditing*. Terjemahan Amir Abadi Yusuf. Jakarta: Salemba Empat.
- Gemi and Singleton. 2003. *Managing the Audit Function :A Corporate Audit Department Procedures Guide* 3<sup>rd</sup> edition. Printed in USA.
- Departemen Dalam Negeri, Kepmendagri Nomor 47 tahun 1999 *Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum*.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga. Balai Pustaka.
- Gujarati, Damodar N. 2003. Basic Econometrics. 4th edition. New York: McGraw Hill.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2001. *Standar Profesional Akuntan Publik*. Cetakan kedua. Yogyakarta : YPKN.
- JJ. Amstrong Sembiring, 2004. Summary of citing internet situs. *Globalisme Dan Privatisasi Air Di Indonesia* (http://digilib.ic.id/gdl.php.?1999)
- .....,2004. Summary of citing internet situs. Fenomena Air Bersih.(www.sekitarkita.com)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 dan 13. 1998. Tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum), dan Perusahaan Perseroan (Persero). Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 13. 2001. Tentang Kedudukan Auditor Internal di BUMN. Jakarta.

- PERPAMSI. *Program Penyehatan PDAM*. Melalui (<u>www.perpamsi.org</u>) 20 Desember 2010.
- Rina Sri Nova. 2005. Faktor-Faktor Pemeriksaan Internal Yang Berpengaruh Terhadap Peningkatan Keandalan Struktur Pengendalian Intern. Tesis. Universitas Padjajaran Bandung,
- Sawyer B. Lawrence, Dittenhofer A. Mortimer. 2003. *Internal Auditing*. The Insitute Internal Auditor. 5<sup>th</sup> edition. Florida.
- Sugiyono. 2002. Statistik untuk Penelitian. Cetakan kedua. Bandung: CV. Alphabet
- The Institute of Internal Auditor. 2008. Standards for the Professional Practice of Internal Auditing. FloridA
- Tugiman, Hiro. 2000. *Pandangan Baru Internal Auditing*. Edisi keempat. Yogyakarta : Penerbit Kanisius.
- ...... 2000. Pengantar Audit Internal. Jakarta: YPIA.

## **BIODATA PENULIS**

Riani Tanjung, SE, MSi, sebagai dosen Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi UNJANI.